

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

JURNAL SYARI'AH & HUKUM

JSYH

Vol. 1 (1) FEB. 2019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JSYH

Vol. 1 (1) FEBRUARI 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Editorial Advisory

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

Editor in Chief

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

Manager Editor

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

Editorial Boards

Prof. Dr. Jasser Auda,
Maqasih Institute, London

Dr. Habib-ur-Rehman,
*International Islamic University, Islamabad,
Pakistan*

Prof. Srawut Aree, MA, Ph.D
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Prof. Dr. Shofian Ahmad,
*Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala
Lumpur*

Prof. Dr. M. Amin Suma, SH, MA
*Faculty Sharia and Law UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, Indonesia*

Dr. Deni K. Yusuf, MA

*Faculty Sharia and Law State Islamic
University Sunan Gunung Djati, Bandung,
Indonesia*

Prof. Dr. Mahfud MD, SH, SU
*Faculty of Law Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, Indonesia*

Prof. Drs. Akh. Minhajie, MA, Ph.D
*Faculty Sharia and Law UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, Indonesia*

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
*Faculty of Islamic Studies Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
*Faculty Sharia and Law UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, Indonesia*

Drs. M. Tamyiz Mukharram, MA, Ph.D
*Faculty of Islamic Studies Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.
*Faculty of Islamic Studies Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

al-Mawarid was initially published as *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to *al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*. *al-Mawarid* warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

al-Mawarid Editorial Office

Gd. KH. A. Wahid Hasyim
Fakultas Ilmu Agama Islam
Univesitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001
E. islamicfamilylaw@uii.ac.id



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

Editorial

Seiring dengan perkembangan zaman, umat tidak akan pernah lepas dengan problematika yang menjamur akibat perubahan realita social. Dewasa ini, realita social dianggap sebagai factor yang cukup dominan dan strategis digunakan dalam proses pembentukan hukum. Tidak sedikit bahkan hampir setiap produk hukum Islam merupakan hasil kontemplasi dan interaksi dengan lingkungan, masyarakat, geografis, politik dan aspek-aspek lain yang mengitarinya. Syari`at atau hukum Islam adalah segala sesuatu yang Allah Swt. syari`atkan kepada hambanya mencakup perkara keyakinan, peribadatan, akhlak, muamalah, serta aturan hidup untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt. dan sesama manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Definisi di atas merefleksikan bahwa perkembangan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi ruang baik horizontal maupun vertikal dan waktu yang selalu melingkupinya. Sehingga syari`at atau hukum Islam senantiasa responsif dalam menjawab problematika kekinian bersama-sama dengan hukum nasional yang ada di Indonesia.

Pada hakikatnya ada keterkaitan antara hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia yang belum banyak diketahui khalayak ramai. Jimly Asshiddiqie menuturkan bahwa tidak akan ditemukan istilah hukum dalam bahasa Indonesia kecuali mendapat pengaruh dari bahasa Arab karena secara etimologi 'hukum' diambil dari kata 'al-hukmu' yang secara implisit menunjukkan adanya pengaruh tradisi hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Sejarah mencatat bahwa khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab pernah melakukan sebuah ijtihad yang sangat memperhitungkan kondisi social kemasyarakatan ketika akan menentukan eksekusi hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian. Beliau tidak serta merta mengambil eksekusi potong tangan karena kasus pencurian tersebut dilakukan dalam kondisi paceklik dan pertimbangan-pertimbangan lain seperti ketidakjelasan motif pencurian sebagaimana kaidah umum yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa Rasulullah bersabda "Idra'û al-hudûd bi al-syubuhât." yang artinya tinggalkanlah sanksi sebab adanya syubhat. Selain dari kisah di atas, masih banyak lagi contoh relevansi hukum dengan realita social dengan berbagai konteks yang menyertainya tanpa menafikan keabsahan teks-teks ilahiyah.

Pada tulisan yang berjudul Semangat Kebangsaan Kiai Pesantren: Analisa Gagasan dan Spirit Kemerdekaan KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibriz, Muhadi Zainuddin dan Miqdam Makfi menuangkan gagasan cemerlang tentang nasionalisme dan perjuangan melalui sebuah karya tafsir. Selain itu tulisan ini mengangkat tentang biografi Kiai Bisri Mustofa yang merupakan refleksi tentang bagaimana perjuangan tentang cinta tanah air, nasionalisme, hubbul wathan, bergerak secara sinergi. Nuansa perjuangan begitu melekat pada diri beliau karena beliau adalah pejuang yang ikut turun ke

medan tempur melawan kolonialisme. Disamping itu, gagasan tentang nasionalisme juga beliau aktualisasikan dalam karya-karya beliau. Upaya dan kegigihan KH. Bisri Mustofa dalam menjelaskan ayat-ayat ilahiyah beliau tuangkan dengan menggunakan Bahasa Arab Pegon (Arab-Jawa) sehingga makna-maknanya mudah dicerna dan difahami dengan baik oleh masyarakat Jawa. Hal ini menjelaskan bahwa beliau menggunakan pendekatan social-antropologi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dari Al-Qur'an yang sarat akan nash-nash hukum.

Rizal Maulana dalam jurnal ini menulis Kompleksitas Masyarakat Indonesia Kontemporer (Agama, Sosial-Individu dan Ekonomi Budaya) yang sangat kental membahas problematika masyarakat Indonesia modern dari berbagai perspektif. Salah satu yang menarik adalah Sementara kita mempunyai tugas mempromosikan kelestarian budaya asli, tradisi-tradisi lama bertemu dengan kreatifitas baru setiap harinya di kota-kota dunia, memelihara identitas dan keanekaragaman. Dialog antar budaya adalah salah satu tantangan terbesar umat manusia, dan kreatifitas dikenal sebagai sumber yang tidak pernah berhenti mengilhami masyarakat dan ekonomi.

Selanjutnya tulisan Ahmad Fathurrahman yang berjudul Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama berupaya memberikan komparasi secara seimbang antara konsep ganti rugi yang ditawarkan oleh hukum Islam dan hukum perdata. Tulisan ini merupakan kajian terhadap putusan kasus pada Pengadilan Agama (PA) Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl Adapun penentuan ukuran ganti rugi menurut hukum perdata tidak lepas dari peranan hakim dalam penentuan nominal atau ukurannya. Kemudian awal kalkulasi ganti rugi dimulai saat debitur melakukan wan-prestasi. Sedangkan menurut hukum Islam besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan (at-taqdir al-ittifaqi) dan penggantian ganti rugi di lakukan oleh hakim (al-taqdir al-qadai) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya.

Kemudian tulisan Fatemah Ahmad dan Arif Ali yang berjudul al-Hukûk al-Asâsiyah Li dhawi al-Î`âqah fi al-Syarî`ah al-Islâmiyyah (Hak-hak Dasar Yang Dimiliki Oleh Penyandang Cacat (Disabilitas) menurut Syari`at Islam) mencoba mengelaborasi hak-hak yang bersifat fundamental yang melekat pada individu disabilitas. Penulis ingin memaparkan bahwa Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum disabilitas, sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa syariat Islam sangat dinamis dan rahmatan lil`alamin.

Kajian ini mencoba untuk mengklarifikasi al-Hukûk al-Asâsiyah yaitu hak-hak yang mutlak ada yang diperoleh sebagai manusia dan ditandai sebagai salah satu pilar yang tidak dapat disentuh dilanggar dan merupakan prasyarat untuk mewujudkan hak-hak manusia lainnya. Adapun hak-hak asasi yang diperjuangkan seperti hak untuk hidup, memperoleh martabat, kesetaraan, keadilan, pendidikan, pekerjaan dan privasi. Hasil terpenting dari penelitian ini adalah bahwa: Islam menjaga

nilai-nilai kemanusiaan dan martabat orang cacat dan melarang segala bentuk kekerasan atau penelantaran hak. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat hidup dengan baik, nyaman serta dapat berintegrasi dan berinteraksi dengan orang lain di dalam masyarakat secara normal tanpa ada tekanan, penghinaan atau dipermalukan.

Beberapa naskah atau tulisan di atas mungkin belum bisa mendeskripsikan secara sempurna dan ideal tentang pengaruh realita social dalam melahirkan produk-produk hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional. Oleh karena itu, redaksi berharap hal ini dapat memberikan manfaat dalam memantik munculnya pemikir-pemikir di bidang hukum secara holistic. (Redaksi 2019)

JSYH

Vol. 1 (1) FEBRUARI 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
The National Spirit of Kiai Pesantren: An Analysis of the Ideas and Spirit of Independence of KH. Bisri Mustofa in the Interpretation of Al-Ibriz <i>Muhadi Zainuddin, Miqdam Makfi.</i>	1
Kompleksitas Masyarakat Indonesia Kontemporer (Agama, Sosial-Individu Dan Ekonomi -Budaya) <i>Rizal Maulana</i>	23
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama <i>Ahmad Fatkhurrohman</i>	43
Islamic Law Studies on the Use of Infak Fund for Land Waqf <i>Roem Syibly, Farly Adwi</i>	61
الحقوق الأساسية لذوي الإعاقة في الشريعة الإسلامية The Basic Rights of Disability in Sharia <i>Fatemah A., Arif Ali</i>	73
Review Buku-Fiqh Moderat Muhammad Mushtafa Al-Zuhaily <i>Ahmadi Fathurrohman Dardiri</i>	99



Kompleksitas Masyarakat Indonesia Kontemporer (Agama, Sosial-Individu Dan Ekonomi-Budaya)

Rizal Maulana ^{1*}

¹*Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah, Gantar, Indramayu Indonesia 45264*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: November 20, 2018

Accepted: December 21, 2018

Published: February 20, 2019

ISSN: 2656-1654

E-mail address(s):

rizalagam50@gmail.com (Rizal Maulana)

*Corresponding author

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRACT

The picture of the Indonesian in “The New Order” with a variety of needs and conflicts was a problem that later led to the Reformation Era marked by the “fall” of Suharto from his position as President of the Indonesian Republic after ruling for 32 years. The communities appear to have diverse roles. The various forms of behaviour reflected the conditions and circumstances of each, either as an individual or group. Pillage, rape, accusation, blasphemy, on one hand and the establishment of new parties, demonstrations and congregational prayers on the other colour Indonesian society today. A land of a thousand islands with a song of “Nyiur Melambai” (Waving Palm) which symbolizes comfort and peace as it is now has weakened in sorrow, lamenting the fate of the nation that looks ‘messy’ by the variety of concerns and needs of some people. A condition in the nation’s life perceived as a slump becomes difficult to evolve for a better future of a country. The condition appearing in society no longer characterizes the role model of the laws and concern of lives that gave peace and happiness to humanity.

Keywords : Conflict, Reformation, Discrepancy, Role Model, Peace, Happiness.

ABSTRAK

Gambaran Indonesia dalam "Orde Baru" dengan berbagai kebutuhan dan konflik merupakan masalah yang kemudian menyebabkan Era Reformasi ditandai dengan jatuhnya presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah berkuasa selama 32 tahun. Masyarakat tampaknya memiliki peran beragam, berbagai bentuk perilaku mencerminkan kondisi dan keadaan masing-masing, baik sebagai individu maupun kelompok. Kemiskinan, kesenjangan, tudingan, penghujatan, pemihakan satu sisi dan pembentukan partai, demonstrasi dan istighosah adalah gambaran beberapa sisi masyarakat Indonesia saat ini. Tanah seribu pulau dengan nyanyian "Nyiur Melambai" yang melambangkan kenyamanan dan kedamaian, sepertinya sekarang telah mengalami pelemahan dalam berbagai sektor, dan meratapi nasib bangsa yang terlihat berantakan oleh beragam kekhawatiran dan kepentingan individu masyarakat. Suatu kondisi dalam kehidupan bangsa yang dianggap menurun, maka akan sulit berkembang menjadi negara yang lebih baik dimasa depan. Kondisi yang muncul di masyarakat tersebut tidak lagi menjadi panutan dalam hukum dan aturan hidup yang memberi kedamaian dan kebahagiaan bagi umat manusia.

Kata kunci : Konflik, Reformasi, Kesenjangan, Panutan, Kedamaian, Kebahagiaan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempesona sekaligus memikat para ilmuwan untuk mempelajari studi tentang hakikat manusia. Faktanya, Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, hal tersebut menjadikannya sebagai negara yang punya pengaruh besar di Asia Tenggara dan dunia. Disisi lain, Indonesia merupakan negara dengan komunitas muslim terbesar sekaligus negara terbesar ketiga dengan sistem demokrasinya. Perkembangan dunia modern baik dari segi industri dan teknologi secara garis besar membuat

masyarakat menjadi sekuler, walaupun ada beberapa pandangan yang berbeda seperti di negara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Demokrasi di Indonesia sebenarnya masih dibidang berumur muda, seiring berjalannya waktu dengan dukungan agama seolah-olah demokrasi menjadi hal yang dapat diterima, lain halnya dengan negara lain yang rakyatnya menyatakan bahwa pemerintah dan gereja adalah hal yg berbeda. Secara umum pandangan sebaliknya justru terjadi di Indonesia yang menganggap bahwa politik dan

agama memiliki relasi yang cukup dekat.¹ Indonesia merupakan negara dengan suku/etnik yang beragam. Tercatat kurang lebih terdapat 700 bahasa yang digunakan dan tidak kurang dari 200 suku yang mewakili setiap budaya yang beragam.² Dengan adanya budaya yang beragam secara tidak langsung menghadirkan lingkungan sosial yang bercorak. Setiap lingkungan terdiri dari masyarakat dan perilaku sosial yang berbeda sehingga melahirkan terciptanya ekspansi budaya dan ekonomi seiring dengan berkembangnya Indonesia. Tidak dapat dipungkiri dari hal tersebut, maka faktor ekonomi menjadi salah satu tolak ukur berkembangnya suatu negara. Sebagai negara yang pernah terjajah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdiri dengan satu hukum yang mengatur segala ruang lingkup sosial. Disisi lain, meskipun berpayung hukum, bentuk hukum yang terjadi tidak lepas dari peran agama dan budaya yang menjadi tonggakunya. Secara garis besar patut disadari bahwasanya agama dan budaya merupakan salah satu penuntun kehidupan sosial dan individu di Indonesia. Meskipun setiap orang beragama dan berbudaya, tidak sedikit manusia mencoba untuk menggali makna dan

tujuan hidupnya. Dan tidak sedikit pula ilmuwan memaparkan kajian penting terhadap tujuan dan kebahagiaan manusia. Pandangan mengenai kebahagiaan seolah menjadi loncatan pemikiran manusia tentang arti penting sebuah tujuan hidup yang panjang dan bukan sekedar sesuatu yang sementara.

Mengambil sebagian besar gambaran Indonesia saat ini, agama dan budaya seolah selalu terhiasi dengan masalah dan perpecahan yang tidak bisa dihindari. Apabila dikaji lebih dalam, maka semua setuju bahwa agama bukan lahir dari budaya, faktanya agama lahir dari Tuhan sedangkan budaya adalah murni produk dari manusia. Bagaimanapun, masalah maupun perpecahan adalah hal yang lumrah, karena agama dan budaya saling berhubungan atau lebih tepatnya bercampur dan tak dapat dipisahkan. Munculnya budaya populer atau budaya masa kini dalam masyarakat saat ini menciptakan pengaruh terhadap kehidupan beragama dan melahirkan ide populer tentang pandangan kajian-kajian agama seperti pemikiran, ceramah, ritual dan simbol-simbol keagamaan.³

Dengan adanya keterikatan agama dan budaya, lingkup sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini di Indonesia dianggap mampu

¹Jennifer L. Epley, "Voices of the Faithful: Religion and Politics in Contemporary Indonesia," (A Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Political Science) in The University of Michigan, 2010), hlm. 5

²Indah. F, "Pengertian dan Definisi Indonesia Menurut Para Ahli," Carapedia,

(http://carapedia.com/pengertian_definisi_indonesia_menurut_para_ahli_info511.html, diakses 10 Juni 2017).

³Donny Gahril Adian, "Relations between Religions and Cultures in Southeast Asia" Indonesian Philosophical Studies I, (The Council for Research in Values and Philosophy, 2009), 153.

menggambarkan kehidupan dinamis yang secara dramatis mempengaruhi masyarakat. Saat ini, setiap orang bebas untuk memilih bagaimana mereka berperilaku. Generasi manusia adalah generasi kehidupan yang tiada habisnya, mereka tidak akan terlepas dari pengaruh kehidupan modern dan tipudaya dunia saat ini. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini dikelilingi oleh empat faktor, yaitu globalisasi, modernisasi, sains dan sekularisasi. Kondisi ini selalu berubah dalam aspek lingkungan yang lebih maju atau dapat dibilang lebih baik dalam kehidupan komunal.

Dalam kehidupannya, manusia tidak bisa lepas dari lingkungan masyarakat. Kecenderungan orang untuk mengikuti gaya hidup baru di suatu lingkungan yang lebih menarik terkadang melemahkan dan membubarkan nilai-nilai tradisional yang telah ada. Nilai-nilai yang berkaitan dengan solidaritas dan sikap terhadap kerja sama telah dirusak oleh nilai-nilai individualistik, bahkan materialisme menggantikan nilai spiritualitas manusia. Di Indonesia sikap baik yang sepatutnya menciptakan keharmonisan hidup telah berubah menjadi sikap yang selalu ingin bersaing dan menang sendiri bagaimanapun caranya, serta tanpa memandang dengan siapa mereka berurusan.⁴

Dari beberapa pandangan diatas, bisa dipahami bahwa kita hidup di sebuah masyarakat yang memiliki sistem dinamis dan kompleks. Kompleksitas masyarakat Indonesia menyebabkannya memiliki potensi untuk berkembang ke dalam berbagai kemungkinan keadaan. Ia bisa tertata dan bergerak lebih maju, atau juga bisa hancur. Maka semua bergantung dari bagaimana individu dan masyarakat Indonesia bersikap dan menjadikan kompleksitas yang beragam ini bermanfaat bagi semua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan negeri ini, guna mencari formula yang sesuai dalam menyikapi dilema kompleksitas bangsa ini.

AGAMA

Pakar bahasa Indonesia memiliki pendapat yang berbeda tentang kata "agama" atau kepercayaan. Perbedaannya antara lain adalah agama yang berarti kombinasi dari kata "a" yang artinya "tidak" dan "gama" sebagai "kacau", atau konon diambil dari bahasa Indo-Germania yang membuat kombinasi kata-kata, seperti kata pergi "geoin" dan "geng" sehingga agama berarti "jalan ke surga". Al-Qur'an menyebut apa yang kita maksud dengan agama sebagai *al-Dien*. Dalam bahasa Arab, kata *dain*

⁴Jeda Poemomo Sigit Sidi dan Bernadette N, "Manusia Indonesia Abad 21 yang Berkualitas Tinggi Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi," Himpunan Psikologi Indonesia,

(<http://www.himpesi.or.id/index.php/publikasi/131-manusia-indonesia-abad-21-yang-berkualitas-tinggi-ditinjau-dari-sudut-pandang-psikologi>, diakses 21 Mei 2013).

(hutang) atau *dīn* (sanksi dan agama) mencerminkan hubungan antara dua arti dengan makna yang lebih tinggi dari yang lain. Oleh karenanya agama merupakan hubungan antara manusia dan Tuhan.⁵ Sedangkan kata *dīn* yang diturunkan dari akar bahasa Arab *dīn*, dalam pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas⁶, memiliki banyak penanda dasar yang secara konseptual saling berhubungan, sehingga makna pokok yang diturunkan menampilkan diri sebagai kesatuan yang jelas akan keseluruhan. Keseluruhan ini menggambarkan bahwa apa yang dimaksud sebagai konsep *dīn*, dapat dipadatkan menjadi empat makna utama yaitu: (1) hutang (terhadap kewajiban); (2) ketundukan; (3) kekuatan hukum; (4) kehendak hati atau kecenderungan alamiah. Pada tahap ini semakin bertambah jelas bahwa konsep *dīn* dalam bentuk paling dasar sungguh merefleksikan kesaksian yang benar akan kecenderungan alamiah manusia untuk membentuk masyarakat, mematuhi hukum, dan mencari pemerintah yang adil.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komaruddin Hidayat berpendapat bahwa fungsi dasar agama mengalami defleksi atau pembalikan. Awalnya agama melayani manusia dengan cara untuk kebaikan bersama, kemudian agama menjadi realitas sosial dan

doktrin yang memaksa manusia untuk mengikuti dan mematuhi. Agama dalam pengertian tersebut menurut sosiolog Peter Berger dalam bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality*, dikatakan bahwa agama telah mengalami proses objektivitas.⁷ Agama yang telah mengalami proses objektivitas suatu saat akan menjadi sangat rentan, kaku, sempit dan terbatas. Dengan demikian, orang beragama yang memiliki sikap semacam itu akan sangat sensitif jika kepercayaan dan keyakinannya terhadap agama diganggu. Agama berperan dalam mewujudkan dan mengabadikan tatanan sosial. Secara sosiologis, sepatutnya ada korelasi positif antara integrasi agama dan public, karena agama adalah unsur realitas yang melekat pada masyarakat majemuk.

Secara sosial, hampir semua orang Indonesia menginginkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini, masa depan melalui semboyan Indonesia Baru. Singkatnya, Indonesia saat ini bukanlah Indonesia yang diharapkan oleh para pahlawan terdahulu. Hari ini Indonesia dikhianati oleh banyak kondisi yang tidak sesuai, di antaranya: otoritas politik yang meragukan, kurangnya transparansi, hilangnya kepercayaan rakyat, pemisahan kelas politik, dan pembodohan masyarakat

⁵ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), 52.

⁶ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), 41-42.

⁷ Komaruddin Hidayat, *Agama Di Tengah Kemelut*, (Jakarta: Mediacita, 2001), 58-59.

dalam skala yang cukup besar. Harapan Indonesia Baru adalah Indonesia dengan institusi demokrasi rakyat oleh orang-orang dengan pemerintahan yang adil, makmur, progresif, dan menyembah Tuhan yang Maha Esa.⁸

Pengkajian perihal agama, otoritas, dan masyarakat, seharusnya dikaji lebih dalam kaitannya dengan ruang lingkup religius. Agama selalu hadir dalam setiap kehidupan manusia, oleh karena itu secara berkesinambungan digunakan sebagai bahan penelitian dalam ilmu sosial. Otoritas maupun dampaknya akan selalu muncul dalam kehidupan bersama bermasyarakat. Agama dan adanya pihak yang berkuasa akan selalu ada dan menjadi kebutuhan masyarakat. Agama dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan yang memberi arahan kepada segenap alam semesta, pemberi motivasi sekaligus dasar etis dan moral suatu tindakan yang memberi manfaat bagi individu dan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, agama memberikan pondasi etika moral dan spiritualitas.

Faktor otoritas dianggap sebagai dilema utama. Secara umum dengan adanya otoritas, krisis kepercayaan sering muncul di Indonesia. Menurut Komaruddin Hidayat, krisis kepercayaan adalah krisis amanat. Kata

"amanat" serupa dengan kata "iman" dan "keamanan". Kata tersebut berhubungan erat dengan sikap orang terhadap imannya untuk meraih keamanan. Dalam bahasa Indonesia yang mencakup istilah bahasa Arab, kata "amanat" didefinisikan sebagai *amanah*. Dalam bahasa Arab, istilah *amanah* dikaitkan dengan kata *iman* atau *amnu* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "credo", "credit", dan "credibility". Istilah-istilah tersebut menunjukkan sikap percaya dan mempercayakan keselamatan kepada Tuhan, karena diyakini bahwa keselamatan hanya ada di tangan-Nya.⁹

Dalam konteks kehidupan bernegara, pemerintah akan dipercaya oleh masyarakat. Dengan begitu masyarakat mengukur keseriusan dan kesuksesan pemerintah dalam menjalankan amanat. Jika masyarakat merasa kehidupan mereka tidak aman, maka mereka bisa jadi tidak akan mempercayai pemerintah. Sebagai contoh, ketimpangan pemerintah dalam kecurangan keuangan oleh beberapa koruptor menunjukkan kelemahan kepercayaan di dalam otoritas. Ini menunjukkan bahwa amanat dan kepercayaan rakyat sedang dalam krisis. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap amanat yang ditunjukkan oleh pemerintah sangat penting untuk mendapat dukungan rakyatnya. Hoffman dan

⁸ Aziz Mushoffa, *Kiprah Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002), 14.

⁹ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 86.

Bateson menyatakan bahwa: “*service quality leads to customer satisfaction*”.¹⁰ Semakin baik kualitas layanan yang diberikan oleh suatu pemerintah, semakin tinggi pula kepuasan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas layanan yang diberikan, semakin rendah pula kepuasan masyarakatnya. Masyarakat yang menunjukkan kepercayaan besar kepada pemegang amanat akan melakukan apapun yang diperlukan untuk keberhasilan amanat tersebut. Secara psikologis, rahasia mengapa orang fanatik terhadap kepercayaan agama ditentukan oleh ideologi dan kepercayaan dari diri mereka sendiri, hal ini karena mereka percaya bahwa segala sesuatu memiliki kepastian ketenangan dan keselamatan eskatologis.

Membahas isu keagamaan di Indonesia tidak terlepas dari pertimbangan pemerintah dan masyarakat. Hubungan antara masyarakat dan agama membuat orang tidak serta merta mengacuhkan pemerintah. Pengamatan sederhana terhadap agama, pemerintah, dan masyarakat tersebut menyiratkan bahwa masyarakat menempatkan agama pada posisi penting, seperti contoh dengan adanya banyak pembangunan tempat beribadah dan menghargai para ulama. Sebaliknya, apabila masyarakat kurang menghormati keputusan pemerintah, maka mereka akan sangat mudah

berpaling dari pemerintah dan kemungkinan dari mereka juga tidak menghargai ulama, sehingga keberadaan ulama hanya dianggap sebagai pelengkap. Dengan demikian bisa berdampak pada sedikitnya pembangunan tempat ibadah atau fungsionalitasnya menjadi berkurang. Masyarakat mensyaratkan bahwa mereka dan pemerintah harus memiliki hubungan yang erat. Para ulama memainkan peran sebagai legislasi dalam mendukung keputusan pemerintah, namun pemerintah memberikan fasilitas sesuai dengan kehendak ulama sehingga tidak ada celah antara pemerintah dan ulama.

Setiap hubungan antara agama dan masyarakat dibangun secara berbeda dan akhirnya dapat melahirkan berbagai tipe masyarakat. Tipe masyarakat pertama, memiliki dinamika bermasyarakat yang cenderung lamban, bersifat feodalistik, kuat dalam tradisi, tertinggal dan sulit untuk berinovasi. Masyarakat semacam itu menghadirkan banyak hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan lagi tanpa melibatkan para pemimpin agama. Tipe kedua, masyarakat yang menempatkan pemerintah sebagai pemain dominan dan mendukung berkembangnya sifat-sifat seperti individualisme, materialisme, dan liberalisme. Ada pula tipe ketiga, masyarakat yang

¹⁰ Hoffman, Doug, dan Bateson.EGJohn, *Service Marketing Concepts, Strategies, and Cases*, (Thompson: South Western, 2006), 298.

menjalin hubungan erat antara pemerintah dan ulama. Kemudian menciptakan cara yang tidak mudah untuk mendapatkan kebebasan bagi masyarakat, pihak pemerintah akan sedemikian mudah untuk dikritik dan agama sering digunakan sebagai alat legitimasi, sedangkan rakyat tetap berada di pihak yang terbawah. Adapun jenis keempat, jika masyarakat dan pemerintah menciptakan sarana interkoneksi.¹¹ Ini adalah tipe ideal dari perspektif publik begitu pula dalam hal kepentingan. Di sini tidak ada hubungan antara agama dan pemerintah; Keduanya bersifat independen dan terpisah sehingga pemerintah memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan menghindari langkah manipulatif. Pemerintah yang dianggap sebagai contoh masyarakat untuk mewujudkan potensi yang bereksistensi, memiliki fungsi yang benar dan adil. Hal ini disebabkan agama menawarkan bimbingan spiritual yang jelas.

Oleh karena itu, masyarakat yang menempatkan pemerintah dan agama dalam tatanan sesuai, akan mendapatkan keuntungan baik dari segi jasmani dan rohani, selain itu manfaat spiritual bisa menciptakan masyarakat yang damai dan bahagia. Spiritualitas dan agama adalah penghubung antara jiwa manusia dengan kuasa Tuhan Yang Maha Esa.

Simbol yang agung dan sempurna dari Tuhan mendorong jiwa untuk berkorban dan mendekatkan diri kehadirat-Nya. Pengorbanan dilakukan entah karena takut atau karena keinginan untuk cinta.

Dalam hal tersebut diatas, Quraish Shihab berpendapat bahwa untuk menjadi agamis setidaknya ada tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Pertama, jiwa harus merasakan kehadiran Yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta. Kehadiran Tuhan dirasakan terus menerus oleh seseorang, tidak hanya saat orang ini berada di tempat suci. Kedua, kemunculan dorongan hati untuk menjalin hubungan dengan Yang Maha Kuasa, hubungan tercermin dalam ketaatan melaksanakan apa yang diyakini sebagai perintah dan kehendak-Nya, dan juga menjauhkan diri dari larangannya. Ketiga, percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah hadiah tertinggi yang pada akhir zaman. Dengan kata lain, kepercayaan ini merupakan cerminan kepercayaan akan adanya akhirat.¹²

Secara historis dan sosiologis, agama-agama besar yang ada sejak dahulu kala sejatinya muncul di masyarakat terbatas dan tidak dalam masyarakat terbuka seperti yang kita temukan saat ini. Hal ini disebabkan oleh perkembangan demografis, revolusi teknologi,

¹¹Aziz Mushoffa, "Kiprah Islam", 11-12.

¹²M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi "al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 22-23.

dan perkembangan media massa.¹³ Agama di dunia yang berkembang saat ini menjadi bagian dari lingkup komersial internasional. Informasi religius yang dikemas dalam bentuk buku, kaset video, seminar, aplikasi internet, dan ideologi agama mudah ditemukan dimana-mana.

Semua program televisi, radio, dan media massa di Indonesia secara kompetitif menawarkan informasi yang bersifat religius dan lagi studi agama di perguruan tinggi telah meningkat selama bertahun-tahun. Salah satu fenomena baru saat ini adalah bahwa beberapa informasi moral dan religius yang telah diterima oleh sebagian masyarakat tidak lagi dapat di terima dan dihargai secara eksklusif oleh salah satu kelompok orang yang memiliki pemikiran tradisional. Pidato keagamaan di televisi dan buku-buku komprehensif agama memang diminati oleh berbagai kelompok masyarakat dan kelompok agama. Karena memang tidak di pungkiri bahwa semua agama mengajarkan yang baik dan positif kepada manusia.

Quraishy Shihab menyatakan bahwa pada awalnya umat manusia adalah satu macam/golongan. Manusia semua patuh dan tidak memberontak melawan Tuhan. Kejahatan muncul di antara manusia setelah adanya rayuan dan godaan oleh setan dan

nafsu. Hampir semua manusia menyimpang, beberapa orang melestarikan kesucian kodrat sebagai manusia dan ada pula yang tidak taat.¹⁴ Dari pernyataan di atas tersebut, kita mengakui bahwa semua agama awalnya percaya pada kebenaran yang sama. Kendati demikian pemahaman segelintir masyarakat terhadap agama dan godaan nafsu menyebabkan mereka menyimpang, oleh karena itu di antara mereka kita menemukan orang-orang yang berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan sebagian yang lain meninggalkannya. Mereka yang meninggalkan kebenaran akan dipandu oleh al-Qur'an kembali ke arah yang benar. Berdasarkan pengertian bahwa pada awalnya semua agama sama, al-Qur'an membawa mereka ke poin penting yaitu *kalimatun sawaa'*.¹⁵ Ayat ini adalah manifestasi dari Nabi Muhammad SAW untuk mendorong umat Kristiani dengan cara yang bijak dan halus untuk menegakkan firman (ketentuan) dan menyembah hanya kepada Allah.

Ajaran agama diturunkan oleh Tuhan untuk kepentingan umat manusia. Dengan bimbingan agama, manusia diharapkan bisa menerima tuntunan yang benar dalam kehidupan. Dengan kata lain, manusia diciptakan bukan demi agama, tapi agama diwahyukan untuk kebutuhan manusia, maka agama adalah jalan bukan tujuan. Melalui

¹³Komaruddin Hidayat, "Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme", 53.

¹⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol 6), 45.

¹⁵Al-Qur'an, Ali-'Imraan: 64

bimbingan agama, manusia mendekat kepada Tuhan dan mengharapkan pahalaNya melalui perbuatan baik yang meliputi dimensi vertikal yaitu ritual keagamaan dan horisontal yaitu dedikasi sosial.¹⁶

Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai memiliki unsur kesucian, serta ketaatan. Di mana pun agama berada diharapkan dapat memberi panduan nilai atau moral bagi seluruh kegiatan kehidupan manusia, baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Tak jarang juga agama menjadi faktor penentu dalam proses perekat interaksi sosial budaya masyarakat sekaligus pemersatu bangsa.

KEBUTUHAN SOSIAL DAN INDIVIDU

Manusia pada dasarnya memiliki tujuan hidup, di antaranya yang terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Kehidupan manusia membutuhkan berbagai kebutuhan seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya kebutuhan dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, waktu, dan kepercayaan. Makanya, semakin tinggi tingkat

peradaban suatu masyarakat semakin banyak pula kebutuhan yang harus terpenuhi.

Kebutuhan diklasifikasikan secara subjektif menjadi kebutuhan sosial dan individu.¹⁷ Kebutuhan sosial menyangkut kelompok umum seperti membangun sekolah, rumah sakit, dan jembatan. Sedangkan kebutuhan individu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing orang. Semisal kebutuhan seorang petani dan dokter berbeda sesuai dengan kepentingan mereka. Kebutuhan sosial sehari-hari individu seperti makanan, uang, tempat tinggal, teman, keluarga, dan bantuan pihak lain merupakan beberapa contoh yang membuktikan bahwa kehidupan sosial dan individu saling berhubungan. Masyarakat dan individu adalah entitas pelengkap, masyarakat yang baik hanya bisa dicapai bila setiap individu dapat hidup bersama dan peduli terhadap hak dan kewajibannya. Disisi lain sebagai perumpamaan untuk orang yang dikucilkan dari masyarakat tidak akan bisa melakukan aktivitas kebutuhannya sendiri.

Memenuhi kebutuhan merupakan syarat untuk bertahan hidup dan hal tersebut adalah bagian mendasar dari kehidupan manusia. Saat ini ponsel dianggap sebagai kebutuhan banyak orang dan bagi siswa

¹⁶Komaruddin Hidayat, "Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme", 61.

¹⁷Ima Rahma Mardiah, "Get Success: Ujian Nasional Ekonomi" untuk SMA/MA, (Bandung Grafindo Media Pratama, 2008), 2.

sepatutnya buku adalah bagian dari kebutuhan mereka. Dalam lingkup fenomena sosial; kasih sayang, empati, kerja sama, dan komunikasi dengan orang lain adalah kebutuhan sosial yang sangat nyata. Sedangkan dalam lingkup individu; pendidikan, cinta, rekreasi, olahraga, dan kesehatan merupakan beberapa kebutuhan utama.¹⁸ Dalam memenuhi kebutuhan mereka, manusia tidak hanya berpikir dan mengemukakan idenya, mereka mungkin juga menggunakan cara yang salah untuk mencoba mewujudkan apa yang dipikirkan dan dicita-citakan. Mereka tidak melakukan kegiatan tersebut secara individu, namun bisa jadi melalui kerja sama dengan orang lain dan kemudian berhasil mewujudkan cita-cita individu yang mencakup kebutuhan sosial.

Kerjasama dengan saling bergantung antara satu dan yang lain serta melibatkan beberapa orang untuk berbagi perasaan dan pemikiran, pada dasarnya mampu membawa perubahan, baik positif maupun negatif dalam suatu hubungan. Suatu hubungan bergantung pada apa yang orang saling berbagi satu sama lain. Jadi, nilai sebuah hubungan secara langsung dapat ditentukan bila ditanamkan ke dalam sebuah relasi. Sebagai contoh, hubungan dengan seseorang menciptakan hubungan dengan orang lain, apakah dia

anggota keluarga, teman, atau tetangga.¹⁹ Entah bagaimana sulitnya untuk memiliki hubungan yang nyata, karena setiap orang akan memiliki komitmen terhadap sebuah hubungan. Ketika individu memiliki hubungan yang di rasa benar, terkadang terjadi beberapa penyimpangan dan kesalahan, karena tidak ada satu hal pun yang sempurna dan tidak ada yang selalu benar. Pada akhirnya kasih sayang selalu lebih baik daripada kesempurnaan dalam hubungan.

Sikap masyarakat terhadap lingkungan dipengaruhi oleh nilai sosial, demikian juga lingkungan memiliki dampak terhadap masyarakat. Sikap masyarakat terhadap nilai sosial yang ada di masyarakat akan selalu berubah. Begitulah hubungan antara masyarakat dan lingkungan yang dinamis. Hubungan akan terus berlanjut meskipun akan menciptakan kebaikan atau keburukan lingkungan sosial.²⁰

Para sosiolog tertarik pada bagaimana individu menjadi anggota masyarakat dan mereka belajar budaya di mana mereka berada. Melalui proses sosialisasi, individu belajar apa yang diharapkan di dalam masyarakat. Pada lingkup mikro, kebanyakan orang tua mengajarkan perilaku yang tepat kepada anak agar sukses dalam kehidupan, sedangkan

¹⁸ Buraq, "Hubungan, Sebuah Kebutuhan Dasar", (<http://id.prmob.net/hubungan-interpersonal/manusia/ilmu-sosial-359628>, di akses 18 Mei, 2013)

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Anne Ahira, "Lingkungan Sosial," (<http://www.anneahira.com/lingkungan-sosial.htm>, diakses 21 Mei, 2013).

teman sebayanya memengaruhi mereka untuk menyesuaikan diri dan bersenang-senang. Seorang psikolog yang fokus pada individu menyatakan bahwa hal tersebut adalah asal mula identitas dan tahapan dalam pengembangan moralitas atau kepribadian.²¹ Namun, sebagian besar menyadari bahwa perkembangan dan perilaku individu terjadi hanya di lingkungan sosial. Sebenarnya proses sosialisasi dalam kelompok memungkinkan diri berkembang ketika individu belajar berinteraksi dengan orang lain dalam budaya mereka.

Perubahan sosial adalah serangkaian perubahan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat Indonesia telah mengalami berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi terus-menerus baik di masyarakat pedesaan dan perkotaan. Bila kita membandingkan kehidupan masa lalu masyarakat Indonesia dengan masa kini, banyak perubahan terjadi di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kesehatan. Tak diragukan lagi perubahan sosial tersebut telah mempengaruhi masyarakat Indonesia dan menyebabkan kemajuan sekaligus perbaikan dalam kehidupan manusia. Manusia juga harus berusaha mengikuti perubahan teknologi sebagai akibat peradaban masyarakatnya tanpa

mengarahkannya kepada kemunduran, tetapi menjadikannya suatu kemajuan untuk manusia. Fraenkel, seorang tokoh perubahan masyarakat²², menyatakan bahwa kemajuan teknologi tidak saja merupakan modifikasi dari suatu bagian ilmu pengetahuan, akan tetapi mempunyai akibat mengubah pola hidup manusia dan mengubah pola struktur sosial secara keseluruhan.

Seiring dengan perubahan zaman, masyarakat Indonesia telah mengembangkan norma, pandangan, dan kebiasaan baru dalam berperilaku. Era globalisasi di abad ke-21 ini telah membawa arti baru untuk bekerja. Bekerja memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar menghasilkan uang dan mengukur kinerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Orang cenderung mengejar kesempatan untuk bisa memuaskan kebutuhan kemajuan diri dan tampil sebagai pemenang dalam sebuah kompetisi untuk mendapatkan sesuatu yang substansial. Bisa disimpulkan bahwa untuk bisa mengikuti gaya hidup baru, orang membutuhkan dukungan kemampuan ekonomi yang tinggi. Daya tarik gaya hidup modern mendorong banyak orang untuk bekerja. Orang sibuk mengumpulkan pendapatan mereka hanya untuk bisa mendapatkan standar gaya hidup yang layak

²¹ Jeanne H. Ballantine, Keith A. Roberts, *Our Social World: Introduction to Sociology*, 2nd edition, (Canada: Pine Forge Press, an Imprint of SAGE Publications, Inc, 2009), 102-103.

²² George Friedman, "The Social Consequences Of Technical Progress," dalam *International Social Sciences, (Social Implication Of Technical Change Unesco Summer)*, 243.

sehingga terkadang mereka kurang memperhatikan lingkungan sosial.

Kestabilan psikologis seseorang menjadi pertimbangan dalam ruang lingkup politik. Dia harus menjadi orang yang tidak dibenci, orang yang bisa akur dan bersahabat bahkan sangat bersahabat dengan siapa saja. Kestabilan psikologis menjadi hal yang cukup sensitif seperti halnya orang Afrika dan Asia yang sangat cepat merasakan dirinya direndahkan atau diprasangkai. Tentu salah satu karakteristik yang diperlukan oleh warga negara untuk menjadi panutan dan baik adalah bahwa ia tidak boleh memiliki prasangka rasial.²³ Dia harus merasa bersaudara, kooperatif, dan harus menjadi pemimpin yang dapat dipercaya daripada seseorang yang tidak dipercaya, oleh sebab itu dalam jangka panjang dia tidak boleh bersikap otoriter atau semena-mena.

Perilaku masyarakat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku antar individu di masyarakat. Setelah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, Indonesia bangkit sebagai sebuah bangsa dan masyarakatnya sangat antusias membangun bangsanya. Mereka memegang kebanggaan dan identitas sebagai negara merdeka dan berdaulat sehingga mendorong adanya interaksi antar kelompok etnis. Ada kebutuhan untuk saling mengenal

satu sama lain; memahami dan menghargai bahwa persatuan tidak hanya simbolis tapi juga meluas dalam kehidupan sehari-hari.

Dasar dari datangnya sebuah kebutuhan adalah adanya landasan untuk maju sehingga memberi kesempatan kepada semua manusia dalam menjalani kehidupan yang menyeluruh.²⁴ Oleh karena itu dalam kehidupan manusia, kebutuhan komunal dan individual dipahami sebagai kutub positif dan negatif dalam aliran listrik. Jika kedua kutub positif dan negatif terhubung dalam dua kutub listrik yang menyatu, mereka akan dapat memberi kekuatan dan membangkitkan perubahan baru dalam kehidupan. Maka kehidupan individu dan masyarakat akan lebih bergairah dengan adanya kebutuhan individu dan sosial yang terlibat.

Hubungan antara kebutuhan individu dan sosial pada kesimpulannya dinyatakan bahwa kebutuhan individu lebih penting daripada kebutuhan sosial. Karena kenyataan bahwa individu akan menentukan karakter suatu masyarakat, meskipun pada umumnya masyarakat harus melayani kebutuhan individu. Individu memiliki hak mutlak yang seharusnya tidak diambil oleh masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan individu seperti kebahagiaan, kedamaian, dan kebebasan

²³A. H. Maslow, *The Farther Reaches of Human Nature*, (United States of America: Arkana, 1993), 92.

²⁴Paul Streeten, *Reading in Human Development*, 'Shifting Fashions in Development Dialogue,' in S. Fukuda-Parr and S. K. Kumar, (Delhi: Oxford University Press, 2003), 72.

adalah tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

EKONOMI DAN BUDAYA

Kehidupan sosial merupakan perpaduan himpunan dari karya, selera, dan kreasi publik. Budaya sosial dalam arti luas mencakup semua aspek dalam kehidupan. Oleh karena itu, berdasarkan rasionalitas, pemahaman tentang sistem kultural masyarakat di Indonesia dapat didefinisikan sebagai keseluruhan nilai. Tatanan sosial dan perilaku manusia Indonesia merupakan manifestasi dari karya, indera dan kreasi dari kehidupan sosial. Akibatnya, sistem kultural masyarakat Indonesia memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan batin secara sadar sesuai dengan pola pikir positif.

Indonesia adalah negara dengan sumber kekayaan yang berlimpah, namun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat bisa dibilang jauh dari kata makmur. Kegaduhan dalam skala besar telah biasa terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Bima, Sumatera dan Papua. Sejumlah ancaman perpecahan dapat dilihat secara signifikan di Papua. Sebagai tambahan, tindakan korup yang terjadi di banyak aspek kehidupan telah menjadi

tingkah laku lazim di Indonesia baik tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Kata-kata Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sudah tidak asing lagi bagi telinga masyarakat Indonesia. Kapan pun ada protes anti pemerintah, akronim ini sudah pasti terdengar dari teriakan para demonstran atau terlihat jelas terpampang di spanduk-spanduk demonstrasi. Korupsi, kolusi dan nepotisme bagi sebagian besar penduduk Indonesia merupakan bagian tidak terlepaskan dari pemerintah Indonesia, yang mungkin berujung dan diharapkan berakhir pada rezim Orde Baru yaitu masa Presiden Suharto 1965-1998. Isu mengenai korupsi dan politik di Indonesia terus menjadi berita utama harian dalam banyak media di Indonesia dan menghasilkan banyak perdebatan hangat dan diskusi sengit. Kalangan akademisi termasuk ilmuwan terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi ini berakar pada masyarakat pra-kolonial tradisional yaitu era penjajahan Belanda yang cukup panjang, atau era penjajahan Jepang yang relatif pendek (1942-1945), atau pemerintah independen Indonesia setelahnya.²⁵

Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat pelenggara negara

²⁵Menurut beberapa studi sosiologi, korupsi muncul dari ruang lingkup kehidupan komunitas. Komunitas adalah kesatuan kehidupan manusia sosial yang berinteraksi dengan sistem kebiasaan tertentu, terjadi, dan terikat oleh rasa identitas bersama yang sesuai dan dapat diterima. Van der chaar, "Korupsi di

Indonesia," Analisis KKN-Indonesia Investments, (http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/trisiko/korupsi/item_235, diakses 26 Mei, 2013).

menyebabkan terjadinya korupsi. Seolah-olah korupsi menjadi bagian dari politik dan birokrasi di Indonesia. Penggunaan cara ilegal, gratifikasi, tidak adil dan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis dan politik telah mengakar di bidang politik dan birokrasi sejak awal pemerintahan Soekarno.²⁶ Dari perspektif ekonomi, praktek korupsi akan mempengaruhi perekonomian negara, dan mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara dalam skala besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan sebagainya diluar batas kewajaran. Aspek yang paling penting adalah ketika perkembangan sektor publik menjadi stagnan. Seperti halnya dana APBN dan APBD sepatutnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat dalam membangun fasilitas umum, namun hampir tidak terealisasi dengan baik. Sekalipun memang demikian berjalan, bisa jadi fasilitasnya tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan.²⁷ Sehingga dipastikan ekonomi Indonesia digambarkan sebagai ekonomi yang lamban disebabkan banyak faktor yang menghambat kemajuannya.

Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik di atas kertas dalam dua tahun terakhir yang lalu yaitu pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Secara bertahap dana subsidi minyak dan gas (MIGAS) dikurangi oleh pemerintah terkait dengan bensin, minyak solar dan minyak tanah yang telah dianggap membebani keuangan pemerintah. Pemerintah Indonesia mencoba menyesuaikan harga barang dengan mekanisme menstabilkan harga dari fluktuasi pasar. Meskipun tanpa meninjau langsung apakah hubungan ekonomi domestik mengikuti dasar sistem ekonomi internasional, namun terbukti secara ekonomi Indonesia mengindikasikan kondisi yang membaik. Meskipun demikian, masih banyak orang Indonesia yang berada dalam garis kemiskinan. Pemerintah dianggap belum mampu mengatasi pengangguran dan nilai tukar rupiah yang pada saat itu masih tetap rendah sekitar 9000 per \$1 AS. Kemampuan nilai beli orang Indonesia masih sangat lemah secara umum dan tingkat korupsi masih tinggi sehingga Indonesia menduduki peringkat kelima dengan negara paling korup di dunia.²⁸

Pertumbuhan ekonomi terkait dengan pembangunan manusia dan fasilitasnya. Oleh karena itu perkembangan ekonomi dianggap

²⁶Fethi Ben Jomma Ahmed, *The Dilemma of Corruption in Southeast Asia*, (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2005), 232.

²⁷ Harinto Anggoro, "Birokrasi," *Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Indonesia*, 2012,

(<http://birokrasi.kompasiana.com/2012/03/04/dampak-korupsi-terhadap-perekonomian-indonesia-444293>, diakses 26 Mei, 2013).

²⁸Ridwan Idris, "Perubahan Sosial budaya dan Ekonomi Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan", (ejurnal UIN Alauddin 2003), 225.

sebagai patokan dan merupakan proses yang membuat negara lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia tidak lepas dari sistem pendidikan dan kebudayaan, karena keduanya merupakan sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dari sekolah dasar sampai ke universitas, pemerintah Indonesia memiliki program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu pendidikan moral telah diimplementasikan oleh masyarakat pada setiap budaya di Indonesia.

Diskusi tentang pendidikan moral terkadang tidak lepas dari faktor budaya yang ada di masyarakat. Orang juga sering menempatkan budaya sebagai simbol, bahkan sebagai simbol identitas nasional. Bila dilihat dari aspek sosial kewarganegaraan, budaya mencerminkan kondisi suatu bangsa. Budaya yang terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa ia adalah fenomena nyata dan bukan sekedar ungkapan atau karya tertentu yang bisa dihentikan oleh unsur tertentu. Budaya merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan mempengaruhi pola pikir manusia. Perwujudan budaya terwujud dalam produk manusia sebagai makhluk berbudaya.

Budaya dianggap sebagai realitas nyata yang membantu manusia menjalani kehidupan sosial, seperti pola perilaku, bahasa, kebutuhan hidup, organisasi sosial, kesenian, dan lain-lain.

Menurut hasil laporan mengenai pembangunan manusia tahun 2004²⁹, menegaskan bahwa budaya sebagai bagian penting dari hak dan kehidupan, penyangkalan akan hal tersebut dapat menyebabkan kehilangan sesuatu hal yang penting. Dengan penekanan pada kebebasan dalam bidang budaya, hasil laporan tersebut merupakan ledakan liberalisme yang mana hak-hak kelompok didominasi oleh hak-hak individu dan konservasi akan budaya dapat teradvokasi untuk mengalami perubahan. Sesuai dengan laporan tersebut maka kebebasan budaya adalah aspek penting dari kebebasan manusia, penting bagi orang yang memiliki kemampuan untuk hidup sesuai keinginan mereka dan memiliki kesempatan untuk memilih dari pilihan yang mereka miliki atau yang bisa mereka miliki.

Dalam konteks kehidupan nyata, seorang pria akan mengungkapkan kenyataannya sebagai makhluk yang memiliki

²⁹ Sarah White and S everine Deneulin, "Culture and Religion" in *An Introduction to the Human Development and Capability Approach: Freedom and Agency* edited by S everine

Deneulin with Lila Shahani (Earthscan in the UK and USA, 2009), 256.

pencapaian dalam budaya.³⁰ Prestasi manusia selalu tercermin dalam budaya yang menghubungkan antara manusia dan lingkungan. Hubungan ini menjadikan budaya sebagai alat yang pasti dalam berperilaku di masyarakat. Perilaku moral cenderung mengacu pada manusia mana pun dan terkadang mencerminkan kepribadiannya. Saat ini perilaku moral orang Indonesia berada di ambang transisi, dimana mayoritas mengikuti gaya hidup populer tanpa memperhatikan atau peduli terhadap realitas mereka.

Tambahan pula, salah satu masalah budaya utama Indonesia adalah isu identitas nasional. Arus globalisasi yang cepat secara bertahap mengikis pentingnya budaya nasional. Budaya asing sekarang lebih cepat diterima oleh masyarakat Indonesia dan mulai mengurangi eksistensi budaya lokal yang sepatutnya dari dahulu tertanam dalam setiap individu. Budaya global memberikan dampak pengaruh terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia terutama dalam hal ketidaksetaraan status sosial. Ketidaksetaraan sosial secara tidak langsung dapat merusak harga diri individu dan budaya lokal. Oleh karena itu pelestarian budaya lokal menjadi sangat penting nilainya dan merupakan kebutuhan bagi pembentukan karakter bangsa.

Singkatnya, kehidupan social dan ekonomi di Indonesia sangat mempengaruhi masyarakat. Ekonomi menghasilkan konsekuensi negatif dan positif sekaligus dapat mengubah sistem sosial, gaya hidup, dan pergaulan. Selama konsekuensi ekonomi dan beberapa budaya lain yang mempengaruhi stratifikasi sosial tetap ada, perbedaan mencolok perilaku manusia, pola kebiasaan, dan dalam hubungan sosial akan tetap ada.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas kita bisa melihat adanya peluang dan tantangan ke depan dalam memberdayakan kemajemukan masyarakat Indonesia. Pemahaman terhadap kompleksitas masyarakat Indonesia membutuhkan penghayatan mendalam dan menyeluruh baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keragaman keberagaman. Tantangan internal terbesar Indonesia sejak awal adalah masalah pluralitas, terutama dari segi keagamaan. Belajar dari para pendiri bangsa dalam menghadapi kompleksitas keberagaman adalah dengan memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda-beda, mereka melakukan diskusi terbuka, berdebat, saling mendengar, dan masing-masing pihak bersedia memperluas pandangan keagamaannya. Dalam bahasan ini, mereka

³⁰Ismail Nawawi, *Pembangunan dalam Perspektif Islam: Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 169.

telah melakukan penalaran publik atas keyakinan-keyakinan religiusnya, yakni usaha memperluas wawasan keagamaannya, sehingga dihasilkan suatu pemahaman keagamaan yang inklusif. Agama merupakan sumber makna dan motivasi yang menolong dalam membendung kekuatan kapitalisme global. Dan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi sumber nilai yang memperkaya etika kewarganegaraan multikultural serta mendorong solidaritas maupun penghargaan yang setara bagi manusia.

Cenderung persepsi masyarakat kita terhadap kesejahteraan itu hanya mencakup sisi penghasilan saja. Padahal seseorang yang mempunyai penghasilan yang tinggi, belum tentu sejahtera. Untuk apa mempunyai penghasilan yang tinggi jika tinggal di lingkungannya merasa terancam?. Jika kesejahteraan itu hanya mencakup penghasilan yang tinggi, maka fokus pembangunan kita adalah mencari laba yang setinggi-tingginya. Disini perlu dirubah paradigma pandang kita mengenai kesejahteraan, karena kesejahteraan itu mencakup kelangsungan hidup dalam jangka panjang, mulai rasa aman, pangan, lingkungan, pendidikan, sosial dan kesehatan. Pembangunan ekonomi sebagai pembangunan kehidupan dan kesejahteraan sosial. Adapun tantangan pembangunan ekonomi dalam rangka membangun kedaulatan bangsa, diharapkan meliputi beberapa hal yaitu:

tantangan eksternal (ketidakpastian arah kebijakan moneter negara-negara maju), tantangan pembangunan nasional, dan tantangan pengelolaan fiskal. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai peran dan potensi strategis dalam menunjang perekonomian nasional. Pemberdayaan usaha ini dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis sehingga diharapkan mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dunia tidak hanya menghadapi tantangan-tangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kreatifitas, pengetahuan, keanekaragaman dan keindahan adalah dasar yang tak terhindarkan bagi dialog untuk perdamaian, dan kemajuan dari nilai-nilai tersebut pada hakekatnya terhubung dengan pembangunan manusia dan kebebasan-kebebasannya. Sementara kita mempunyai tugas mempromosikan kelestarian budaya asli, tradisi-tradisi lama bertemu dengan kreatifitas baru setiap harinya di kota-kota dunia, memelihara identitas dan keanekaragaman. Dialog antar budaya adalah salah satu tantangan terbesar umat manusia, dan kreatifitas dikenal sebagai sumber yang tidak pernah berhenti mengilhami masyarakat dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny G (2009). *“Relations between Religions and Cultures in Southeast Asia”* Indonesian Philosophical Studies I, The Council for Research in Values and Philosophy
- Al-Attas, Muhammad Naquib. (1995) *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC
- Ahmed, Fethi Ben Jomma. (2005). *The Dilemma of Corruption in Southeast Asia*, Kuala Lumpur: University of Malaya Press
- Anggoro, Harinto. (2012) “Birokrasi,” *Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Indonesia*. (<http://birokrasi.kompasiana.com/2012/03/04/dampak-korupsi-terhadap-perekonomian-ndonesia-444293>)
- Ahira, Anne. *“Lingkungan Sosial,”* (<http://www.aneahira.com/lingkungan-sosial.html>).
- Ballantine, Jeanne H and Keith A. Roberts. (2009). *Our Social World: Introduction to Sociology*, 2nd edition, Canada: Pine Forge Press, an Imprint of SAGE Publications, Inc
- Buraq, *“Hubungan, Sebuah Kebutuhan Dasar”*, (<http://id.prmob.net/hubungan-interpersonal/manusia/ilmu-sosial-359628>).
- Doug, Hoffman dan Bateson.EG.John. (2006). *Service Marketing Concepts, Strategies, and Cases*, Thompson: South Western
- Epley, Jennifer L. (2010) “Voices of the Faithful: Religion and Politics in Contemporary Indonesia,” (A Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Political Science) in The University of Michigan.
- Friedman, George. *“The Sosial Consecuences Of Technical Progress,”* dalam International Sosial Sciences, (Sosial Implication Of Technical Change Unesco Summer).
- F, Indah. *“Pengertian dan Definisi Indonesia Menurut Para Ahli,”* Carapedia, (http://carapedia.com/pengertian_definisi_indonesia_menurut_para_ahli_info511.html).
- Hidayat, Komaruddin. (2001). *Agama Di Tengah Kemelut*, Jakarta: Mediacita.
- Hidayat, Komaruddin. (1998). *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998

- Idris, Ridwan. (2003).” Perubahan Sosial budaya dan Ekonomi Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan”, *ejurnal UIN Alauddin*.
- Mushoffa, Aziz. (2002) *Kiprah Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardiah, Ima Rahma. (2008). “*Get Success: Ujian Nasional Ekonomi*” untuk SMA/MA, Bandung: Grafindo Media Pratama
- Maslow, Abraham. (1993). *The Farther Reaches of Human Nature*, United Stated of America: Arkana
- Nawawi, Ismail. (2009). *Pembangunan dalam Perspektif Islam: Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Sidi, Jeda Poernomo Sigit dan Bernadette N. “*Manusia Indonesia Abad 21 yang Berkualitas Tinggi Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi*,” Himpunan Psikologi Indonesia, (<http://www.himpsi.or.id/index.php/publikasi/131-manusia> indonesia abad 21 yang berkualitas tinggi ditinjau dari sudut pandang psikologi).
- Shihab, M. Quraish. (2000). *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur’an*, Bandung: Mizan
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Menabur Pesan Ilahi “al-Qur’an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M.Quraish.(2006). *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Streeten, Paul. (2003). *Reading in Human Development*, ‘Shifting Fashions in Development Dialogue,’ in S. Fukuda-Parr and S. K. Kumar, Delhi: Oxford University Press
- White, Sarah. and Sēverine Deneulin. (2009). “*Culture and Religion*” in *An Introduction to the Human Development and Capability Approach: Freedom and Agency*, edited by Sēverine Deneulin with Lila Shahani Earthscan in the UK and USA



EDITORIAL POLICIES
al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

EDITORIAL POLICIES

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

Published by

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

FOCUS AND SCOPE

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

AUTHOR GUIDELINES

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

Book with single author

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

Articles in reference books

Alatas, S. F. (2006). *Islam and the Science of Economics in Abu Rabi', I.M. The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

E-Book

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6). Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

Master's thesis, from a commercial database

McNiel, D. S. (2006). *Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother* (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

Doctoral dissertation, from an institutional database

Adams, R. J. (1973). *Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education* (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

Doctoral dissertation, from the web

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/>
in text citation: (Bruckman, 1997)

Journal article with no DOI

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.
in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

Journal article with DOI

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>
in text citation : (Ichwan, 2012)

Abstract as citation

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>
in text citation : (Hasan, 2012)

Mass media article

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.
in text citation : (Sahal, 2014)

Research report

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). The Sexual Victimization of College Women. Research Report.
in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

Monograph

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27).
Singapore: Rajaratnam School of International Studies.

in text citation : (Routray, 2013)

Proceeding article

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory,
Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada,
Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

Paper conference/seminar/symposium

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in
Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation
(CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

Online article in web

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from
<http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

Online research report

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty
reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation
website:

http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcf

in text citation : (kessy and urion, 2006)

Holy book

Qur an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

Encyclopedia

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.

in text citation : (Graycar, 1992)

Interview

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)

in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

Documentary film

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.

in text citation: (Steijlen, 2008)

Author Fee

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

PEER REVIEW PROCESS

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.

3. **Content Review.** A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.
4. **Expert Review.** Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. **Revise the Manuscript.** The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. **Final decision.** The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. **Galley.** The manuscript is handed over to the journal's lay outter; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. **Published.** The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

PUBLICATION ETHICS

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Publication Decisions

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fairness

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and Conflicts of Interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

Promptness

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental Errors in Published Works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

COPYRIGHT NOTICE

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	ṣ	ṣ	s	ص	ṣ	ṣ	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h ¹	h ¹
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	ẓ	ẓ	z	ف	f	f	f	f	ة	a ²			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	q	k	ال	a ³			

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

	ARABIC AND PERSIAN	OTTOMAN AND MODERN TURKISH
<i>Long</i>	or اَ ā و ū ي ī	ā ū ī { words of Arabic and Persian origin only
<i>Doubled</i>	َيّ iy (final form ī) ُوّ uw (final form ū)	iy (final form ī) uvv
<i>Diphthongs</i>	اَؤ au or aw اَي ai or ay	ev ey
<i>Short</i>	ا a u i	a or e u or ü / o or ö ı or i

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.